Analisa Dampak kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% terhadap Daya Beli dan Inflasi

Amam
Universitas Mercu Buana
E-mail: amam.sodri@mercubuana.ac.id

Article History:
Received: 15 Februari 2025
Revised: 26 Maret 2025
Accepted: 03 April 2025

Keywords: *PPN, daya beli, inflasi, konsumsi rumah tangga, Indonesia*

Abstract: *Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% bukanlah kebijakan yang tanpa membawa dampak untuk naiknya harga-harga, yang notabene akan berdampak pula dengan daya beli masyarkat. Penelitian ini mencoba menganalisis untuk membuktikan bahwa kenaikan PPN berdampak pada daya beli dan inflasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuatitatif denagn menggunakan data kuartalan konsumsi rumah tangga dan inflasi sebagai data skunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS untuk periode 2019 – 2021 (sebelm kenaiakn) dan 2022 – 2024 setelah kenaikan PPN menjadi 11%. Metode yang digunakan antara lain uji statistic deskriptif, uji Wilcoxon signed-rank test dan regresi linier sederhana. Dari analisis yang telah dilakukan dinyatakan bahwa konsumsi rumah tangga meningkat dan menjadi lebih stabil setelah kenaikan PPN menjadi 11%, hal serupa dengan inflasi mengamalami keniakan dan fluktuasi yang besar, Berdasarkan uji Wilcoxon, terdapat perbedaan signifikan pada median konsumsi dan inflasi sebelum dan sesudah kenaikan PPN. Pada uji regresi sendirim menunjukan bahwa kenaikan PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga dan inflasi. Hal ini menunjukan bahwa kenaikan PPN menjadi tekanan tambahan pada tinggkat harga yang berpotensi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat*

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Salah satu instrumen fiskal yang sering digunakan oleh pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah Indonesia secara resmi menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat serta tekanan inflasi yang lebih tinggi, khususnya di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Daya beli masyarakat merupakan indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena

mencerminkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Kenaikan PPN, sebagai pajak konsumsi, berpotensi menekan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa cenderung meningkat. Di sisi lain, efek domino terhadap inflasi juga menjadi perhatian serius bagi otoritas moneter.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik serupa. Mahfud et al. (2023) meneliti pengaruh kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia dan menemukan bahwa kenaikan tarif PPN berdampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok pendapatan menengah ke bawah. Selanjutnya, Putri dan Santoso (2021) mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal berupa kenaikan pajak konsumsi cenderung memberikan tekanan inflasi pada sektor barang kebutuhan pokok.

Dari perspektif internasional, Chakraborty dan Kumar (2020) melalui penelitian yang dipublikasikan di International Journal of Public Economics menemukan bahwa kenaikan pajak konsumsi di India berpengaruh signifikan terhadap peningkatan inflasi inti dan menurunkan tingkat konsumsi agregat. Sementara itu, de Mello dan Moccero (2019) dalam jurnal OECD Economic Studies menyoroti bahwa di negara berkembang, kenaikan PPN seringkali memiliki efek jangka pendek yang lebih besar terhadap inflasi dibandingkan dengan negara maju.

Sementara Auerbach dan Gorodnichenko (2017) dalam jurnal American Economic Review menunjukkan bahwa dampak kebijakan fiskal, termasuk kenaikan pajak, sangat bergantung pada kondisi siklus ekonomi. Dampak negatif kenaikan PPN terhadap daya beli dan inflasi cenderung lebih besar ketika ekonomi sedang dalam kondisi lemah atau baru pulih dari krisis.

Melihat masih adanya perbedaan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya serta pentingnya isu ini dalam konteks Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih spesifik bagaimana kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% mempengaruhi daya beli masyarakat dan inflasi di Indonesia setelah kebijakan ini diterapkan pada tahun 2022.

LANDASAN TEORI

Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi. Menurut Sukirno (2020: 154), PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir, sementara yang memungut dan menyetorkan adalah pihak produsen atau distributor. Kenaikan PPN berpengaruh langsung terhadap struktur harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Widodo dan Lestari (2022) menegaskan bahwa PPN sebagai pajak atas konsumsi cenderung memiliki dampak regresif terhadap masyarakat berpenghasilan rendah karena proporsi pengeluaran mereka untuk konsumsi lebih tinggi dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Dalam konteks ini, kenaikan PPN dari 10% ke 11% dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya akan menekan konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, Rahman dan Nuraini (2023) menyatakan bahwa dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kenaikan PPN dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, namun memiliki trade-off berupa penurunan daya beli masyarakat yang rentan terhadap perubahan harga kebutuhan pokok.

Teori Daya Beli

Menurut Mulyani dan Putra (2021), daya beli masyarakat adalah kemampuan konsumen

untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu dalam suatu periode. Daya beli dipengaruhi oleh tingkat pendapatan riil dan harga barang atau jasa. Kenaikan harga akibat peningkatan PPN secara langsung akan menurunkan daya beli, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.

Santoso dan Laila (2022) dalam penelitiannya menekankan bahwa daya beli masyarakat sangat rentan terhadap kebijakan fiskal yang berdampak pada harga barang konsumsi. Di Indonesia, kenaikan harga akibat kenaikan PPN umumnya paling dirasakan oleh kelompok rumah tangga menengah ke bawah yang pengeluarannya dominan untuk konsumsi kebutuhan dasar.

Teori Inflasi

Menurut Hidayat (2021: 78), inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Salah satu faktor penyebab inflasi adalah kenaikan tarif pajak konsumsi seperti PPN. Lestari dan Budianto (2023) menyebutkan bahwa kenaikan PPN biasanya menyebabkan inflasi dari sisi penawaran (cost-push inflation) karena produsen akan menaikkan harga jual untuk mengompensasi pajak tambahan yang harus dipungut.

Penelitian oleh Yuliana dan Pratama (2022) juga menunjukkan bahwa kenaikan PPN memiliki korelasi positif dengan laju inflasi dalam jangka pendek. Namun, efek tersebut dapat berkurang dalam jangka menengah apabila konsumsi masyarakat menurun dan permintaan agregat melemah.

Keterkaitan PPN, Daya Beli, dan Inflasi

Anindita dan Hapsari (2023) mengemukakan bahwa kenaikan PPN dapat menimbulkan efek ganda terhadap perekonomian, yakni menurunkan daya beli masyarakat dan memicu inflasi. Efek tersebut sangat tergantung pada elastisitas permintaan barang atau jasa yang dikenakan pajak. Semakin tidak elastis suatu barang (seperti kebutuhan pokok), maka dampak kenaikan PPN terhadap harga dan inflasi akan semakin besar.

Dalam studi empiris terbaru, Siregar et al. (2024) menemukan bahwa di Indonesia, kenaikan PPN dari 10% ke 11% pada tahun 2022 berkontribusi pada peningkatan inflasi sebesar 0,3% dalam tiga bulan pertama setelah implementasi, serta menurunkan konsumsi rumah tangga sebesar 1,5% pada kelompok pendapatan menengah ke bawah..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan analisis inferensial untuk menguji dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% ke 11% terhadap daya beli masyarakat dan inflasi di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara kenaikan PPN dengan perubahan daya beli masyarakat serta tingkat inflasi menggunakan data numerik dan analisis statistik. Menurut Sugiyono (2021), pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan dan menghasilkan kesimpulan yang berlaku umum.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi, yaitu:

a) Data Konsumsi Rumah Tangga: diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan tahunan Pengeluaran Rumah Tangga periode tahun 2019-2024.
b) Data Inflasi: bersumber dari laporan inflasi bulanan dan tahunan yang diterbitkan oleh BPS dan Bank Indonesia (BI) periode 2019-2024.
c) Data Kebijakan Fiskal: diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait kebijakan kenaikan PPN.

Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai tren konsumsi rumah tangga dan inflasi sebelum dan sesudah kenaikan PPN (periode 2019-2021 sebagai sebelum, dan 2022-2024 sebagai sesudah kenaikan PPN). Statistik yang digunakan meliputi rata-rata, persentase perubahan, dan tren grafik data.

2. Analisis Inferensial

Penelitian ini menggunakan metode Paired Sample t-Test untuk menguji perbedaan signifikan antara daya beli masyarakat (diukur dari pengeluaran konsumsi) dan tingkat inflasi sebelum dan sesudah kebijakan kenaikan PPN diberlakukan.

3. Analisis Regresi Linier

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh langsung kenaikan PPN terhadap tingkat inflasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ghozali (2021), bahwa regresi linier sederhana dapat digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara satu variabel independen (kenaikan PPN) dengan satu variabel dependen (inflasi atau daya beli).

4. Populasi dan Sampel Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data konsumsi rumah tangga dan inflasi di Indonesia pada periode 2019-2024. Pemilihan data menggunakan time series sampling yang mengacu pada data tahunan dan triwulanan dari BPS dan BI.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan software IBM SPSS 26. Tahapan pengolahan data meliputi:

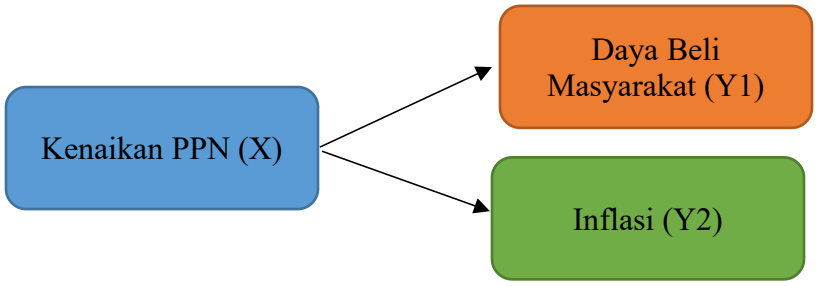
a) Pengumpulan data sekunder dari BPS, BI, dan Kementerian Keuangan.
b) Pengolahan dan tabulasi data untuk periode sebelum (2019-2021) dan sesudah (2022-2024) kenaikan PPN.
c) Uji statistik deskriptif.
d) Uji Paired Sample t-Test untuk membandingkan data sebelum dan sesudah kenaikan PPN.
e) Uji regresi linier sederhana untuk mengukur dampak kenaikan PPN terhadap inflasi.

6. Operasional Variabel

Tabel 6.1. Operasional variable penelitian

No.	Variabel	Sub Variabel	Indikator Pengukuran	Satuan	Sumber Data
1	Kenaikan PPN (x)	Tarif PPN	Persentase kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%	%	Kemenkeu (2022)
2	Daya Beli Masyarakat (y1)	Konsumsi Rumah Tangga	Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah/ tahun	BPS (2019-2024)
3	Inflasi (y2)	Indek Harga Konsumen (IHK	Tingkat inflasi tahunan di Indonesia	Persentase (%)	BPS dan BI (2019-2024)

Grafik 6.1 Grafik operational variable



7. Rumus Uji Statistik

a). Uji Statistik Deskriptif

Untuk melihat gambaran umum data:

$$\text{Mean} = \frac{\sum X}{n}$$

$$\text{Persentase Perubahan} = \frac{(\text{Nilai Sesudah - Nilai Sebelum})}{\text{Nilai Sebelum}} \times 100\%$$

b). Uji Wilcoxon Signed-Rank Test

Untuk menguji perbedaan median antara sebelum dan sesudah kenaikan PPN:

$$W = \sum R^{+}$$

Keterangan:

- W = Jumlah peringkat positif dari selisih data sebelum dan sesudah.
- Peringkat positif diberikan jika nilai setelah lebih besar dari nilai sebelum.
- Peringkat negatif diberikan jika nilai setelah lebih kecil dari nilai sebelum.

- Jika nilai sama, maka dianggap sebagai peringkat nol.
- Hasil uji dibandingkan dengan nilai kritis tabel Wilcoxon atau signifikansi p-value.

c). Regresi Linier Sederhana

Untuk menguji pengaruh PPN terhadap inflasi:

$$Y = \alpha + \beta X + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Inflasi
- X = Kenaikan PPN
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- ε = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Statistik Deskriptif

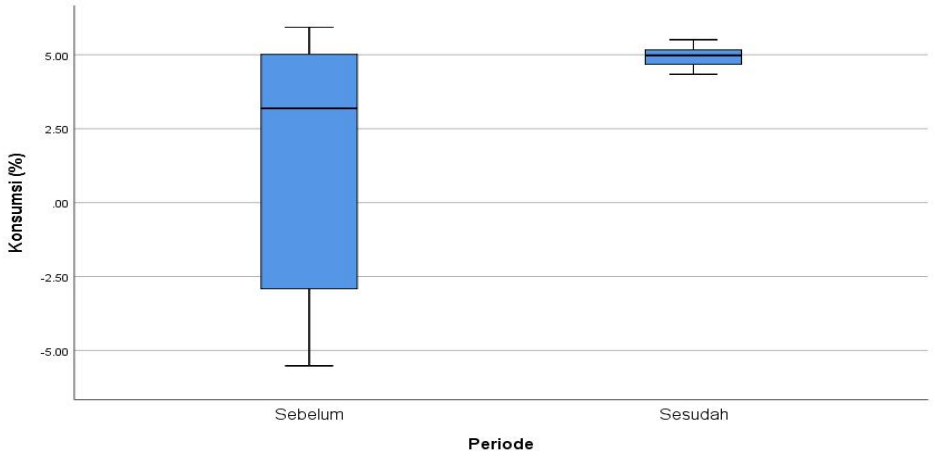
Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum data sebelum dan sesudah kenaikan PPN.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Konsumsi dan Inflasi

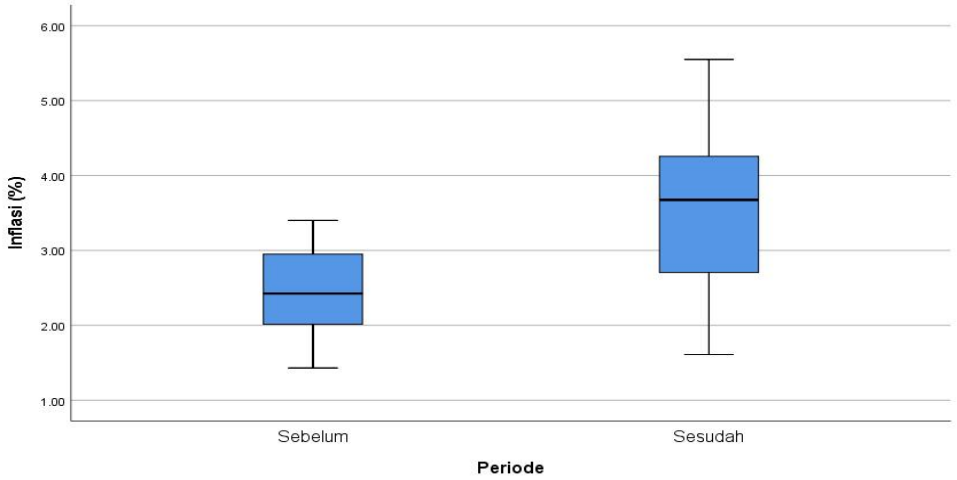
Periode	Konsumsi Mean (%)	Konsumsi Std Dev	Konsumsi Min	Konsumsi Max	Inflasi Mean (%)	Inflasi Std Dev	Inflasi Min	Inflasi Max
Sebelum PPN Naik	1.50	4.21	-5.52	5.93	2.44	0.62	1.43	3.40
Sesudah PPN Naik	4.94	0.36	4.34	5.51	3.55	1.13	1.61	5.55

\

Grafik 1. Boxplot Konsumsi Sebelum dan Sesudah PPN Naik



Grafik 2. Boxplot Inflasi Sebelum dan Sesudah PPN Naik



Dari grafik diatas dapat diinterpretasikan bahwan konsumsi meningkat dan menjadi lebih stabil setelah PPN naik, sedangkan inflasi juga mengalami kenaikan dengan fluktuasi yang lebih besar.

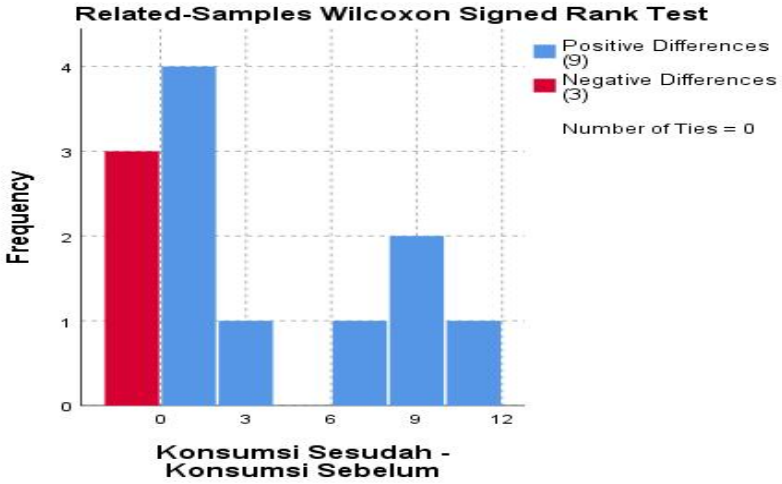
2. Uji Wilcoxon Signed-Rank Test

Uji Wilcoxon Signed-Rank digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan median konsumsi dan inflasi sebelum dan sesudah kenaikan PPN.

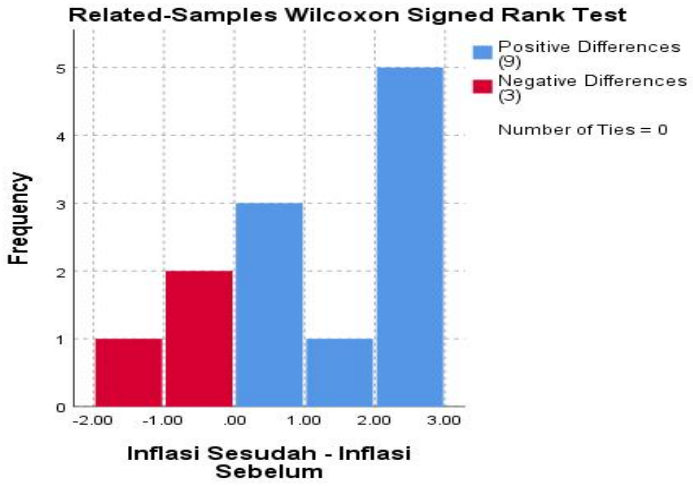
Tabel 2. Hasil Uji Wilcoxon Signed-Rank Test

Variabel	Z	p-Value	Keterangan
Konsumsi	-2.20	0.028	Signifikan (p < 0.05)
Inflasi	-2.11	0.034	Signifikan (p < 0.05)

Grafik 3. Plot Wilcoxon Konsumsi



Grafik 4. Plot Wilcoxon Inflasi



Kedua variabel menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PPN berdampak signifikan terhadap perubahan konsumsi dan inflasi.

3. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh PPN terhadap konsumsi dan inflasi.

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Sederhana

Variabel	R Square	F	β	p-Value	Keterangan
Konsumsi	0.266	7.97	3.44	0.010	Signifikan ($p < 0.05$)
Inflasi	0.291	9.01	1.12	0.007	Signifikan ($p < 0.05$)

Hasil regresi linier sederhana menunjukan kenaikan PPN berpengaruh signifikan terhadap konsumsi dan inflasi. Dummy PPN memiliki hubungan positif dengan kedua variabel, menunjukkan bahwa setelah PPN naik, konsumsi dan inflasi cenderung meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 10% ke 11% berdampak nyata terhadap kondisi makro ekonomi, khususnya dalam mempengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat inflasi nasional. Peningkatan konsumsi yang lebih stabil pasca kenaikan PPN dapat diartikan sebagai indikasi bahwa masyarakat tetap menjaga pola konsumsi meskipun pajak atas barang dan jasa naik. Hal ini mungkin disebabkan oleh stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah serta perbaikan situasi ekonomi pasca pandemi.

Namun demikian, kenaikan inflasi yang lebih bervariasi setelah kebijakan PPN menunjukkan bahwa beban tambahan pajak turut memberikan tekanan pada harga-harga barang dan jasa. Inflasi yang lebih fluktuatif juga dapat mempengaruhi daya beli riil masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah.

Secara keseluruhan, hasil regresi dan uji Wilcoxon menunjukkan bahwa kebijakan PPN berpengaruh secara signifikan dan konsisten baik terhadap konsumsi maupun inflasi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pemerintah mengantisipasi potensi risiko lonjakan inflasi ke depan dan memastikan daya beli tetap terjaga melalui kebijakan pengendalian harga dan stimulus sosial.

Temuan ini juga sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa kenaikan pajak konsumsi seperti PPN cenderung memberikan efek langsung pada harga dan daya beli (Tanzi & Zee, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, Wilcoxon Signed-Rank Test, dan regresi linier sederhana, dapat disimpulkan bahwa kenaikan PPN dari 10% ke 11% di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga dan laju inflasi. Konsumsi masyarakat cenderung stabil dengan pertumbuhan yang lebih tinggi setelah kenaikan PPN, sementara inflasi mengalami kenaikan dan fluktuasi yang lebih tinggi.

Pemerintah perlu mengantisipasi potensi dampak negatif dari kenaikan PPN, khususnya terhadap daya beli kelompok masyarakat rentan. Kebijakan kompensasi berupa subsidi, bantuan sosial, atau pengendalian harga barang kebutuhan pokok dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, monitoring inflasi pasca kebijakan PPN perlu diperkuat untuk mengurangi risiko volatilitas harga.

DAFTAR REFERENSI

Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2017). Fiscal Stimulus and Fiscal Sustainability. American Economic Review, 107(5), 141-145.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019-2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Laporan Konsumsi Rumah Tangga dan Inflasi Indonesia 2019-2024. Jakarta: BPS.

Bank Indonesia. (2024). Statistik Inflasi Bulanan Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Indonesia. Jakarta: BI Publishing.

Chakraborty, P., & Kumar, S. (2020). Consumption Tax Hike and Its Impact on Inflation and Household Consumption in India. International Journal of Public Economics, 25(4), 311-329.

de Mello, L., & Moccero, D. (2019). Fiscal Consolidation and Inflation in Developing Countries: Evidence from VAT Adjustments. OECD Economic Studies, 2019(1), 45-67.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). Basic Econometrics (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Kementerian Keuangan RI. (2023). Laporan Kinerja dan Kebijakan Fiskal 2022-2024. Jakarta: Kemenkeu.

Kementerian Keuangan RI. (2023). Data Tarif PPN dan Kebijakan Fiskal. Jakarta: Kemenkeu.

Mahfud, M., Hasan, R., & Dewi, A. (2023). Pengaruh Kenaikan PPN Terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, 18(2), 145-162.

Pallant, J. (2020). SPSS Survival Manual (7th Ed.). London: Routledge

Putri, D. F., & Santoso, A. H. (2021). Dampak Pajak Konsumsi terhadap Inflasi Barang Kebutuhan Pokok. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 21(1), 77-91.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tanzi, V., & Zee, H. (2021). Tax Policy for Emerging Markets: Theory and Practice. International Monetary Fund.